



Anggaran Kans Digeser, Pilhut Hampir Pasti Batal

MINUT—Hingga berakhirnya triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak di Minahasa Utara (Minut) masih menggantung. Padahal alokasi anggaran senilai Rp1,5 miliar sudah ditata untuk pembiayaan pesta demokrasi desa-desa di Tanah Tonsea tersebut.

Bahkan terinformasi, alokasi anggaran Pilhut bakal digeser untuk pembiayaan perjalanan dinas di lintas OPD. Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPRD Minut Stendry S Rondonuwu (SSR) menegaskan dirinya menolak anggaran Pilhut digeser. Baginya, tidak ada alasan Pemkab untuk menunda Pilhut. Karena proses anggaran terkait pembiayaan Pilhut sudah dibahas sejak tahun lalu. "Ada banyak program-program lain yang dikorbankan agar supaya

bisa tersedia anggaran Pilhut ini, jadi tidak boleh ada rencana untuk Pilhut tidak dilaksanakan," tegasnya.

Dia pun mengkritik Pemkab yang dinilainya lambat mempersiapkan Pilhut. Karena seharusnya sejak Januari sudah dilakukan pembentukan panitia. Apalagi kini lebih dari 50 hukum tua berstatus Plt. Yang notabenebenya didominasi pejabat di pemerintah kecamatan. Hal itu berdampak pada pelayanan di kecamatan yang tidak maksimal.

"Jadi kalau sampai mau ditunda, kami mempertanyakan ada kepentingan apa yang mau diamankan," tegasnya.

Sementara itu, aktivis William Luntungan turut menyoroti lambatnya Pemkab Minut dalam mempersiapkan Pilhut. Dia mengkritisi pula kemungkinan anggaran Pilhut digeser. Baginya, perlu ada



Stendry Rondonuwu



William Luntungan

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Tidak bisa anggaran digeser tanpa persetujuan DPRD Minut.

"Makanya kita menunggu sikap Pemkab Minut. Karena kebijakan soal pelaksanaan atau penundaan Pilhut akan berdampak besar pada proses demokrasi di Minut," nilainya. Diketahui, hingga kini belum ada tanda-tanda Pilhut dipersiapkan. Padahal, jelang pertengahan 2023, tahapan pemilu 2024

akan makin sibuk dilakukan.

Bila hingga APBD-P, alokasi anggaran tak direvisi sementara pelaksanaan Pilhut masih tak jelas, dana yang terlanjur ditata terancam menjadi silpa.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Arnolus Wolajan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilhut tahun ini. Dia menyebut pihaknya perlu berhati-hati agar tidak

menimbulkan masalah baru.

"Kami harus sesuai aturan dan instruksi pusat agar nanti tidak menyalahi. Karena apabila dipaksakan tetapi pada akhirnya tidak diizinkan pusat, pasti ada konsekuensi yang akan berpotensi diterima. Sebab kita tahu bersama, tahun ini juga ada persiapan pelaksanaan pemilu 2024," terangnya saat dihubungi Manado Post.

Baginya, pihaknya telah siap untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilhut. Tetapi agar tidak salah langkah, dia menilai baiknya menunggu petunjuk pimpinan berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat.

"Kalau ditanya kesiapan tentu sudah ada. Kami juga telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak terkait. Tapi kemudian siapa yang akan bertanggung jawab kan perlu dibicarakan lebih lanjut," tandasnya. (Jen)